

**MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA MELALUI PERAN
NAHDLATUL ULAMA DALAM PERJUANGAN
KEMERDEKAAN INDONESIA**

¹Nursanda Rizki Adhari, ²Reza Adriantika Suntara

¹Universitas Islam Syekh- Yusuf, Tangerang, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: nradhari@unis.ac.id, rezasuntara@upi.edu

Abstrak

Kesadaran bela negara menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakan sebuah hak dan kewajiban bagi warga negara yang telah diamanatkan melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan zaman menunjukkan progresivitas yang sangat pesat menuju arah yang lebih maju. Bagaikan pisau bermata dua, hal ini juga memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif globalisasi salah satunya adalah perkembangan segala aspek kehidupan menuju arah yang lebih luas dan mudah dalam aksesnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah peningkatan masalah transnasional yang dapat mengakibatkan permasalahan menuju disintegrasi bangsa. Sebagai warga negara yang baik, dibutuhkan suatu sikap nasionalis menentang segala macam pengaruh buruk dari luar yang dapat mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggali sarana yang dimungkinkan dapat meningkatkan kesadaran bela negara, yakni melalui kajian peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan oleh Belanda dan Jepang hingga pada masa agresi militer pasca kemerdekaan. Peran NU sebagai organisasi muslim memiliki keunikan karena pada perjuangannya para tokoh NU juga mengagas suatu pemikiran yang sangat nasionalis dengan menjunjung tinggi rasa cinta yang besar terhadap NKRI. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dipilih karena pada pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji sumber dan data penelitian melalui kajian kepustakaan yang bersumber pada buku dan jurnal.

Kata kunci: bela negara, Nahdlatul Ulama, perjuangan kemerdekaan.

Abstract

Awareness of national defense becomes a very important thing to support the survival of the nation and state. This is a right and duty for citizens that have been mandated through article 27 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the era of globalization as it is today, the times are showing very rapid progressivity towards a more advanced direction. Like a double-edged knife, this also has both positive and negative effects. One of the positive effects of globalization is the development of all aspects of life in a broader direction and easy access. While the negative impact is an increase in transnational problems that can lead to problems leading to national disintegration. As a good citizen, it takes a nationalist attitude to oppose all kinds of bad influences from outside that can disrupt the harmonization of national and state life.. In this study, the researchers tried to explore other possible means of increasing awareness of defending the country, namely through the study of the role of the Nahdlatul Ulama (NU) in the struggle for Indonesian independence during the occupation by the Netherlands and Japan to the post-independence military aggression. The role of NU as a Muslim organization is unique because in its struggle the NU leaders also adhered to a very nationalistic thought by upholding a great love for the Republic of Indonesia. The research approach uses a qualitative approach, while the method used in this study is the method of literature study. The literature study method was chosen because in its implementation, this study examines the sources and research data through the study of literature sourced from books and journals.

Keywords: defending the country, Nahdlatul Ulama, the struggle for independence.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia secara kodrati telah digariskan Tuhan untuk hidup berdampingan secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kondisi tersebut menjadi sebuah anugerah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan setiap insan, yang pada realitasnya akan selalu membutuhkan kehidupan kolektif dengan orang lain. Sebagai anggota dari sebuah bangsa, tentu saja akan ada konsekuensi yang melingkupinya sehingga hal tersebut harus ia upayakan dan maksimalkan guna menunjang

kerukunan dan kemajuan bangsanya. Pada diri setiap warga negara dikenal istilah hak dan kewajiban, hal ini menjadi sebuah keniscayaan yang melingkupi dirinya masing-masing sebagai anggota pada sebuah negara yang berdaulat. Kenyataan ini merupakan sebuah konsekuensi logis dalam kehidupan sosial, dalam rangka membatasi kehendak individu yang tak terbatas dengan kehendak individu lain dalam kehidupan berkelompok.

Wuryan dan Syaifullah (2015, hlm.23) menjelaskan mengenai hak dan

kewajiban, bahwa “hak adalah sesuatu kekuasaan atau wewenang yang secara sah dimiliki oleh seseorang, baik atas diri pribadi, atau atas orang lain maupun atas harta benda di luar dirinya. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditunaikan sebagai suatu tugas dengan maksud untuk mempertahankan dan membela hak-hak yang dimilikinya”. Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan segala hal yang ia inginkan selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, namun juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sehingga ia dapat mempertahankan hak yang dimilikinya.

Sejarah mencatat bahwa menjelang lahirnya negara Indonesia atau beberapa waktu sebelum diproklamasikannya kemerdekaan, setiap rakyat yang hidup di tataran wilayah Nusantara bersatu padu membangun kekuatan untuk mengusir penjajah dan melahirkan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Perjuangan yang ada pada saat itu tumbuh dan berkembang didorong oleh rasa persatuan dan persamaan atas penderitaan yang sama sehingga memunculkan kehendak diri untuk mengorbankan jiwa dan raga demi tercapainya kepentingan bersama untuk mendirikan sebuah negara bangsa. “Kesadaran kebangsaan yang mengkrystal yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang

tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945” (MPR RI, 2017, hlm.13). Hingga pada akhirnya melalui jalan yang panjang dan berliku kemerdekaan Indonesia pun dicapai.

Dewasa ini kemerdekaan telah dirasakan rakyat Indonesia berpuluh tahun lamanya, namun permasalahan dan ancaman pada negeri ini tidak serta merta lenyap begitu saja. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang hadir pada masa kini tidak lagi berbentuk konflik fisik dari negara lain yang menjurus pada perang antar bangsa seperti saat dulu. Kini lebih dari itu, era disrupsi telah membawa ancaman yang lebih besar pada berbagai sektor kehidupan dalam negeri. Indrawan dan Efriza (2018, hlm.22) menuturkan bahwa “AGHT yang dihadapi oleh bangsa ini berasal dari dalam (internal), dan sangat jarang berasal dari luar (invasi negara lain). Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, ekonomi, korupsi, politik, pengungsi, krisis identitas, bencana alam, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, sampai masalah disintegrasi bangsa”.

Berdasarkan penuturan tersebut dapat dipahami bahwa sejatinya ancaman nyata bangsa Indonesia adalah segala kompleksitas masalah yang ada di dalam negeri. Permasalahan bangsa pada masa kini juga semakin rumit karena sangat berbeda dengan masa penjajahan, apabila dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah yang sudah jelas wujud dan tujuannya akan hal yang merugikan bangsa secara langsung. Namun pada hari ini, musuh bangsa adalah oknum anak-anak bangsa sendiri yang bergerak secara terselubung dalam ruang-ruang tak kasat mata bertindak seolah untuk negara tapi pada hakikatnya berjuang hanya untuk tujuan-tujuan pribadi maupun kelompoknya.

“Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara” (MPR RI, hlm.115). Menanggapi hal tersebut, maka diperlukan sebuah kesadaran dan pemahaman dalam diri warga negara untuk mampu menghindarkan segala bentuk upaya dan peluang yang dapat meretakkan keutuhan bangsa. Selain itu diperlukan aksi nyata yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menunjang keutuhan NKRI dengan beragam upaya yang dapat dilakukannya. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pembelaan negara pada ayat ini memiliki arti yang sangat luas, tidak

selalu berkaitan dengan upaya perang angkat senjata namun juga dengan segala upaya yang mampu mempertahankan keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia.

Secara sederhana bela negara sering kali dikaitkan dengan aktivitas yang menyangkut pertahanan serta hal lain yang bertautan dengan kemiliteran. Namun pada hakikatnya, bela negara lebih dari sekedar aktivitas perang serta hal lain yang mengharuskan orang untuk mengangkat senjata demi keutuhan dan nama baik negaranya. Sudirwo (2015, hlm.55) menjelaskan bahwa “bela negara dalam arti sempit adalah bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bela negara dalam arti luas adalah bela negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan”. Penjelasan Sudirwo memberikan pencerahan bahwa bela negara tidak selalu tentang masalah pertahanan namun juga meluas pada bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saragih, Putri, dan Wardana (2018, hlm.286) menuturkan bahwa “*bela negara is the actualization of Pancasila, the 1945 Constitution and the Unitary State of Republic Indonesia, it is one of the rights and obligations of all Indonesians*”. Penuturan ini memberikan penjelasan bahwa bela negara merupakan suatu hak dan kewajiban warga negara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung pada pilar-pilar utama bangsa sehingga terlaksananya kehidupan yang sesuai dengan cita-cita

bangsa. Aktualisasi yang dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara tentu saja memiliki keberagaman sesuai kemampuan dan kehendak dari diri mereka sendiri, kecuali apabila hal tersebut difasilitasi melalui lembaga ataupun organisasi yang terstruktur secara khusus untuk melaksanakan pembelaan negara seperti pada Tentara Nasional Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui: "(a) pendidikan kewarganegaraan, (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, (c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan (d) pengabdian sesuai dengan profesi".

Keempat upaya tersebut merupakan sarana yang dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam rangka melaksanakan kegiatan bela negara. Sebagai langkah formal ditempuh melalui sarana pendidikan dengan menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan yang diikuti oleh setiap siswa tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi sehingga kesadaran akan pembelaan negara diinternalisasikan melalui ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik di sekolah. Kemudian upaya pembelaan negara juga dapat diwujudkan dengan mendukung pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang digagas oleh pihak pemerintah, hal

seperti ini biasanya dikemas melalui kegiatan wajib militer seperti pernah dilaksanakan pada pemerintahan Presiden Soekarno dengan kegiatan wajib latih mahasiswa.

Selain itu, upaya pembelaan negara dapat dilaksanakan melalui pengabdian dengan menjadi prajurit TNI. Melalui pembukaan masuk prajurit yang dilaksanakan hampir setiap tahun, maka tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengikutinya dan menjalankan upaya pembelaan negara melalui jalur militer. Terakhir, upaya pembelaan negara juga dapat dilaksanakan melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Bagian ini dapat dimaknai dengan menjalankan pembelaan negara melalui profesi yang mampu menunjang kepentingan pertahanan negara atau juga segala profesi yang menunjang keutuhan NKRI.

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat melaksanakan upaya pembelaan negara melalui aktivitasnya yang sejalan dengan nilai pada pilar-pilar kebangsaan serta segala profesi yang tidak bertentangan dengan norma dan aturan negara. Sumawijaya dan Berantas (2015, hlm.52) mengungkapkan bahwa "terdapat lima unsur penting dalam bela negara, yakni (1) kecintaan pada tanah air dan bangsa, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, (4) kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta (5) kesatuan dan persatuan bangsa".

Namun dewasa ini kesadaran akan pembelaan negara yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara dengan ragam upaya yang dapat dilaksanakan masih terbatas pada pola pikir yang mencerminkan bela negara hanya wajib dilaksanakan oleh beberapa kelompok saja. Budiwibowo (2016, hlm.578) menyampaikan bahwa “bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia”. Berdasarkan penyampaian tersebut maka dapat dipahami bahwa pada diri sebagian masyarakat masih terdapat mispersepsi akan arti pembelaan negara.

Maka dari itu perlu diberikannya suatu kesadaran bagi warga negara untuk menyadari bahwa upaya pembelaan negara sejatinya merupakan hak dan kewajiban setiap orang yang hidup pada suatu negara. Peningkatan kesadaran bela negara dapat ditempuh melalui berbagai media, seperti pendidikan, pelaksanaan kembali kegiatan wajib militer seperti telah dilaksanakan di beberapa negara, ataupun melalui kajian sejarah yang mengandung makna serta nilai pembelaan negara untuk dapat dicontoh oleh generasi masa kini.

Kajian sejarah akan tindakan para pahlawan pada masa perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi fisik ataupun sumbangsih pemikiran merupakan salah satu media

peningkatan kesadaran bela negara yang menjadi menarik untuk diteliti. Sumawijaya dan Berantas (2015, hlm.49) menuturkan bahwa “pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini dapat mengantarkan dan menumbuhkan sikap patriotisme di setiap dada bangsa Indonesia. Sikap patriotis menjadi sebuah keniscayaan apalagi ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada akibat dari arus globalisasi dan era komunikasi serta kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari, transformasi budaya asing, baik pengaruh positif maupun negatif, masuk”.

Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menghadirkan banyak tokoh nasional yang berperan dalam membantu menegakkan berdirinya NKRI dari segala macam rintangan dan halangan. Tokoh-tokoh tersebut pun hadir dari beragam organisasi dan wilayah dengan memberi dampak besar bagi persatuan dan kesatuan perjuangan kala itu. Fadhli dan Hidayat (2018, hlm.61) menjelaskan bahwa “dari kalangan umat Islam dan organisasi keagamaan, muncul nama K.H. Hasyim Asy’ari sebagai salah satu ulama besar yang memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui basis pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. K.H. Hasyim Asy’ari berperan penting dalam lahirnya resolusi jihad

menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya”.

Perjuangan yang diwujudkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama organisasi yang dipimpinnya Nahdlatul Ulama telah memberikan gambaran nyata bahwa pelaksanaan pembelaan negara tidak hanya tumbuh dan berkembang pada lingkungan tentara rakyat saja, namun juga berkembang pada jiwa-jiwa santri dan masyarakat muslim yang tidak saja menjunjung keimanan dan ketakwaan pada Tuhan namun juga meninggikan rasa cinta kepada tanah airnya. Peran sentral K.H. Hasyim Asy'ari dalam menggerakkan massa dari kalangan masyarakat muslim pada masa pra-kemerdekaan juga pada masa setelah kemerdekaan merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari rasa kepercayaan dan kepatuhan pada seorang yang telah menjadi panutan. Hidayatullah (2017, hlm.74) menuturkan bahwa “ulama dan kiai merupakan tokoh yang berperan dalam upaya menumbuhkan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Ulama atau kiai hadir sebagai katalisator yang menggerakkan massa dalam berjuang melawan pemerintah kolonial”.

K.H. Hasyim Asy'ari dengan gagasan dan ajarannya telah membangun organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi Islam dengan kesadaran nasionalisme yang tinggi hingga memberikan banyak kontribusi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh

agama dalam melawan penjajahan” (Farih, 2016, hlm.252).

Realitas tersebut menjadi sebuah daya tarik bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian mengenai kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meningkatkan kesadaran bela negara pada masa sekarang. Mengingat pada masa sekarang pelaksanaan bela negara menjadi salah satu hal yang penting terutama bagi generasi muda, bukan sekedar dalam rangka meningkatkan kekuatan fisik namun juga mempertebal keyakinan dan kesadaran untuk senantiasa mempertahankan keutuhan negara dari beragam ancaman nir-militer yang mulai berkembang tanpa disadari pada sendi-sendi kehidupan bangsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. “Karakteristik penelitian kepustakaan tergolong dalam metode penelitian kualitatif, maka ciri-ciri penelitian kualitatif harus ditransformasikan dalam konteks penelitian kepustakaan. Memindahkan *setting* lapangan ke dalam ruang perpustakaan, mengubah kegiatan wawancara, dan observasi menjadi analisis teks dan wacana” (Hamzah, 2020). Penuturan tersebut memberikan penjelasan bahwa pada penelitian ini, peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan observasi ataupun wawancara seperti dilaksanakan penelitian kualitatif pada umumnya.

Maka dari itu melalui studi kepustakaan, peneliti akan menggali sedalam-dalamnya data melalui pengkajian terhadap literatur-literatur yang termuat pada buku maupun jurnal.

Terdapat beberapa alasan dilaksanakannya studi kepustakaan, Zed (2008, hlm.2-3) menuturkan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan seperti berikut “pertama, karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. Kedua, studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Ketiga, ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya”. Ketiga alasan tersebut setidaknya dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan penelitian kepustakaan. Adapun alasan yang bertautan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah alasan pertama, yakni bahwa penelitian ini bermuatan sejarah yang memerlukan riset pustaka karena tidak mungkin dilaksanakan secara langsung.

“Secara umum, tujuan penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu; 1) bersifat penemuan, jika data yang diperoleh dari penelitian merupakan data-data yang baru dan belum pernah diketahui; 2) bersifat pembuktian, jika data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap pengetahuan tertentu; dan 3)

bersifat pengembangan, jika data yang diperoleh digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada” (Hamzah, 2020, hlm.8-9). Penelitian ini sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pengembangan terhadap pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang telah ada.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Peran Nahdlatul Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan suatu organisasi keislaman yang memberikan dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Lahir pada era perjuangan kemerdekaan, sebagai basis perkembangan keagamaan umat NU juga mampu menjelma menjadi sebuah basis kekuatan untuk melawan penjajahan bangsa asing yang tengah mengintervensi bangsa Indonesia kala itu dengan pola penjajahan yang menyakitkan jiwa dan raga masyarakat. “Nahdlatul Ulama sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwah untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya NU 31 Januari 1926, yaitu (1) motif agama, (2) motif mempertahankan *Ahlu al-Sunnah wa'l-Jamma'ah*, dan ketiga motif nasionalisme”

(Farih, 2016, hlm.252). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran NU dalam kehidupan bernegara sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam juga memiliki visi lain yang bertumpu pada semangat kebangsaan melalui nilai-nilai nasionalisme sebagai suatu keniscayaan bagi setiap warga negara.

Adnan (2016) turut menegaskan bahwa “NU yang dilahirkan pada tahun 1926, menyadari sepenuhnya akan dua hal, pertama pluralitas bangsa ini baik secara sosial, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain merupakan *Sunnatullah* (hukum alam) dan aset yang harus menjadi kekuatan, bukannya faktor penghambat eksistensi bangsa”. Ungkapan ini semakin memberikan penegasan bahwa NU pada dasarnya memiliki pandangan yang sangat mendukung pada pola kehidupan nasional yang dapat menyatukan segala macam perbedaan dalam suatu tatanan kenegaraan yang harmonis. Sehingga melalui hal ini, NU dapat memberikan pemahaman kepada para pengikutnya bahwa perjuangan menuju kemerdekaan adalah untuk kepentingan bersama, bukan sekedar untuk meninggikan suatu golongan dan meninggalkan golongan lain yang tidak memiliki paham yang sama.

Perjalanan NU dalam perjuangan kemerdekaan tidak terlepas pula dari nama besar K.H. Hasyim Asy’ari selaku pendiri organisasi NU. Melalui pemikiran serta peran sentralnya di kalangan masyarakat muslim telah membantu kekuatan besar bagi bangsa

Indonesia memerangi penjajah. Zuhri (dalam Hidayatullah, 2017) menjelaskan bahwa “keluasan ilmu pengetahuan serta wawasan *hubb al-watan* yang dimiliki K.H. Hasyim Asy’ari berangkat dari sebuah gagasan dan gerakan. Gagasan yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan penjajah yang dijadikan landasan perjuangan bangsa Indonesia salah satunya adalah semangat jihad”. Wawasan *hubb al-watan* yang dimiliki K.H. Hasyim Asy’ari benar-benar telah memberikan daya yang sangat besar bagi perjuangan bangsa kala yang itu, hingga semangat jihad menjadi sebuah hal yang menggugah kaum muslimin untuk terjun langsung membantu perjuangan kemerdekaan.

Adapun jihad seperti yang diungkapkan pada penuturan sebelumnya, menurut Sudirwo (2015) dijelaskan bahwa “dalam hukum Islam, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan untuk pemberantasan kejahatan serta kedzaliman, baik terhadap diri pribadi, maupun dalam masyarakat”. Ungkapan tersebut memberikan kekuatan pada alasan perjuangan yang dilaksanakan NU pada perjuangan kemerdekaan, bahwa kehadiran penjajah dengan upaya untuk kembali mengeksploitasi kekayaan alam serta sumber daya manusia Indonesia merupakan suatu kezaliman yang harus dilawan.

“Umat Islam di bawah komando para ulama telah memberikan warna

yang terang dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia, utamanya dalam perlawanan menentang penjajahan Belanda, merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik saat seluruh bangsa mempertaruhkan hidup dan mati untuk tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia” (Farih, 2016). Penuturan ini jelas memberi gambaran bahwa kala itu dengan keterbatasan pasukan tentara rakyat dengan persenjataan yang juga sangat terbatas maka sokongan kekuatan dari basis lain yakni kaum muslim yang secara kuantitas sangat banyak di Indonesia sangat diperlukan untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.

Sejalan dengan penuturan sebelumnya, Fadhli dan Hidayat (2018) turut menjelaskan bahwa “umat Islam sebagai penduduk mayoritas merupakan aset pertahanan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan”. Melalui penjelasan tersebut semakin kuat alasan bahwa umat Islam menjadi basis pertahanan yang sangat kuat tatkala digerakkan untuk melindungi bangsa dari serangan penjajah yang hingga pada masa setelah kemerdekaan pun masih ingin kembali menduduki wilayah NKRI melalui agresi militernya.

Dipaparkan pula oleh Farih (2016) bahwa “sikap anti penjajah yang memang sudah pembawaannya, menyebabkanantisipasi terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut keselamatan negara semakin ditingkatkan, lebih-lebih lagi

ketika kehadiran tentara sekutu dan NICA (Belanda) mendarat di Indonesia dan di mana-mana melakukan teror untuk merobohkan negara Republik Indonesia yang masih sangat muda pada waktu itu. Kondisi yang sangat genting seperti ini menjadikan NU di bawah kepemimpinan K.H. Hasyim Asy’ari (yang merasa mempunyai andil dalam proses-proses perumusan kemerdekaannya) terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa terkenal dengan nama ‘Resolusi Jihad’ pada tanggal 22 Oktober 1945”. Fatwa ini memberikan daya yang sangat besar bagi kaum muslim terutama pengikut NU untuk terjun ke medan laga mempertahankan kemerdekaan sebagaimana yang diinstruksikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari selaku pimpinan NU kala itu.

Ungkapan tersebut turut dikuatkan oleh Fadhli dan Hidayat (2018) yang mengutarakan bahwa “resolusi jihad merupakan respon terhadap sikap pasif pemerintah dalam masa-masa transisi pendudukan Jepang kepada Sekutu. Pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif pasca proklamasi kemerdekaan, dan belum dapat mengkonsolidasikan kekuatan militer sebagaimana layaknya bangsa yang berdaulat. Namun demikian, umat Islam khususnya tokoh-tokoh NU meyakini dari sudut pandang agama (*fiqih siyasah*) bahwa pemerintahan yang terbentuk hasil proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pemerintahan yang sah, dan

wajib dipertahankan walaupun harus melalui konfrontasi bersenjata.”

Keadaan Indonesia dengan kemerdekaannya yang masih sangat muda, terhitung baru beberapa bulan saja belum memiliki fondasi kenegaraan yang kuat karena masih dalam tahap awal pembentukan sebuah negara dari wilayah jajahan menjadi negara yang berdaulat. Tentu saja hal ini sangat membahayakan kedaulatan negara apabila konfrontasi negara luar yang dijalankan oleh sekutu dan Belanda tidak segera dilawan melalui perjuangan rakyat yang menyadari akan gentingnya keadaan ini. NU menunjukkan tindakan nasionalisnya dengan melakukan suatu pertimbangan yang menghasilkan gagasan luar biasa untuk mendasari perjuangan. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa basis muslimin yang cenderung berfokus pada aktivitas peribadatan dan pembelajaran di pesantren telah bertambah tugasnya untuk menjaga keutuhan NKRI dari konfrontasi yang dapat merusak tegak berdirinya bangsa Indonesia.

Pada akhirnya perjuangan para muslimin dengan seruan jihad di jalan Allah semakin berkobar melalui resolusi jihad yang diputuskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Farih (2016) menuturkan bahwa “resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir yang dipekkikan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya”.

Selaras dengan ungkapan tersebut, Fadhli dan Hidayat (2018) juga turut menjelaskan mengenai perjuangan pada tanggal 10 November 1945 seperti berikut, “perang 10 November 1945 menjadi salah satu pembuktian implikasi resolusi jihad terhadap perjuangan kemerdekaan. Dari segi perbandingan militer, perang 10 November 1945 menampilkan dua kekuatan militer yang tidak seimbang. Kondisi tersebut layak dicermati adanya faktor lain yang membangkitkan semangat perlawanan, di tengah ketidakseimbangan. Dalam hal ini, kondisi Kota Surabaya yang banyak dihuni oleh para Kyai dan santri juga menjadi determinan bangkitnya perjuangan. Selain itu, jarak Kota Surabaya yang tidak jauh dari kota-kota lain yang dihuni banyak pesantren memudahkan mobilisasi kekuatan jihad umat Islam”.

Perjuangan ini memberikan hasil yang mengejutkan, Sekutu yang merupakan pemenang pada masa Perang Dunia II dengan membawa pasukan yang sangat banyak ternyata mengalami kesulitan yang pada akhirnya menarik diri dari Kota Surabaya. Meninggalnya Jenderal Mallaby pun turut menjadi sebuah gambaran besar akan semangat perjuangan yang dilakukan oleh laskar-laskar jihad di Kota Surabaya. “Resolusi jihad memiliki dampak signifikan terhadap konsolidasi kekuatan bersenjata non reguler, di bawah naungan laskar jihad seperti Sabilillah dan Hizbullah. Peran Kyai dan tokoh-tokoh di pedesaan menjadi faktor penentu keberhasilan

resolusi jihad yang memerintahkan bahwa jika musuh memasuki negeri Islam dan mendudukinya, maka bagi penduduk negeri tersebut berkewajiban untuk memerangnya” (Fadhli dan Hidayat, 2018).

Guyanie (dalam Fadhli dan Hidayat, 2018) menuturkan bahwa ada dua implikasi resolusi jihad terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai berikut.

- 1) Pertama, dampak politik. Lahirnya resolusi jihad secara politik meneguhkan kedaulatan sebagai negara bangsa (*nation state*) yang merdeka dari segala bentuk penjajahan.
- 2) Kedua, dampak militer. Resolusi jihad, dengan tampilnya laskar Hizbullah dan Sabilillah berkontribusi besar melahirkan tentara nasional.

Penjelasan tersebut semakin memberikan gambaran betapa resolusi jihad menjadi penggerak yang sangat masif bagi pelaksanaan perjuangan kemerdekaan Indonesia terutama saat upaya mempertahankan kemerdekaan serta menjadi inspirasi bagi keberlangsungan hidup bangsa setelahnya untuk senantiasa melaksanakan kegiatan beragama dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Urgensi Kesadaran Bela Negara

Sejarah mencatat bahwa penderitaan rakyat Nusantara berlangsung sangat panjang pada masa kolonialisme bangsa asing, hingga pada akhirnya persatuan tumbuh dengan hadirnya organisasi-organisasi yang digagas para intelektual dengan pemikiran nasionalismenya yang tinggi. Kebangkitan nasional yang dimulai pada tahun 1908 menjadi salah satu tonggak dasar pergerakan rakyat Indonesia untuk mengakumulasi kekuatan guna melawan kekejaman penjajah.

Tjakrawerdaja, dkk (2017, hlm.26) menuturkan bahwa tonggak dan konsep kebangkitan nasional terkait dengan perhimpunan Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908. Perhimpunan ini merepresentasikan hal-hal berikut ini:

- 1) ide yang diorganisir melalui praktik sosial politik
- 2) bentuk perhimpunan yang mewakili semangat dari tanah nusantara, dan yang berlawanan dengan semua nilai dan praktik kolonialisme saat itu
- 3) gerakan yang menghimpun pemuka-pemuka pemuda dan masyarakat untuk tujuan emansipatif dan bukan suatu kumpulan untuk hobi, atau kumpulan dari alat kolonial (*ambtenaar*).

Fakta tersebut menyiratkan sebuah makna bahwa kesadaran akan persatuan untuk membangun kekuatan demi menyokong kepentingan bangsa adalah hal yang sangat vital dalam upaya pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hari ini pun, kesadaran

semacam itu masih relevan dan sangat dibutuhkan. Melalui bela negara, kepentingan bangsa menjadi *point of interest* bagi semua, tidak hanya bagi pemangku kekuasaan namun juga pada rakyat secara keseluruhan.

Arliman (2017, hlm.134) mengungkapkan bahwa “kesadaran bela negara merupakan suatu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud pengamalan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia”. Penuturan tersebut memberikan makna bahwa kesadaran bela negara memiliki urgensi yang besar dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, diamalkan pada setiap waktu tidak hanya sekedar saat negara mendapatkan ancaman militer ataupun tengah bersitegang dalam masalah kenegaraan dengan bangsa lain.

Dewasa ini, dengan situasi negara yang telah kondusif diiringi kedaulatan rakyat dan pemerintah yang sama-sama telah berdiri, pelaksanaan bela negara menjadi kompetensi yang harus diamalkan secara kontekstual terhadap keperluan yang dibutuhkan negara. Ridhuan (2018, hlm.433) menjelaskan bahwa ada lima kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh warga negara dalam rangka melaksanakan bela negara seperti berikut:

- 1) rasa cinta tanah air
- 2) rela berkorban
- 3) sadar berbangsa dan bernegara
- 4) meyakini Pancasila sebagai ideologi negara
- 5) memiliki kemampuan awal bela negara

Rasa cinta tanah air menjadi suatu yang sangat penting untuk dimiliki warga negara dalam rangka melaksanakan upaya bela negara pada masa sekarang. Wuryan dan Syaifullah (2015, hlm.29) mengungkapkan bahwa “semangat nasionalisme dan patriotisme tidak hanya penting pada saat perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan, seperti yang pernah dialami rakyat Indonesia pada tahun-tahun silam, melainkan pada saat ini pun, nasionalisme dan patriotisme tetap dan bahkan sangat diperlukan”. Berdasarkan hal ini, rasa cinta tanah air harus senantiasa melekat pada diri warga negara dari generasi ke generasi, karena melalui hal inilah keutuhan nilai, budaya, maupun kekayaan negara akan selalu terjaga oleh bangsanya sendiri.

Sikap rela berkorban pada masa sekarang dapat diwujudkan dengan melaksanakan kehidupan bernegara dengan senantiasa mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Hal ini sangat ringan untuk dipahami secara teori, namun pada praktiknya banyak orang yang tidak dapat mengamalkannya hingga tumbuhlah keserakahan dan tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan diri pribadi seperti praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu meninggikan kepentingan kelompok juga menjadi hal yang harus dihindari bagi seorang yang memiliki sikap rela berkorban bagi negara dan bangsanya.

Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan melalui tindakan yang senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan negara, mematuhi setiap aturan sebagai warga negara, menghindarkan diri dari konflik dan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan bangsa, serta memahami kehadirannya dalam sebuah bangsa adalah untuk senantiasa mendukung keutuhan tanah airnya.

Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara pada hari ini menjadi sangat penting terutama dengan globalisasi yang memberikan keluasaan dan kesempatan bagi ideologi lain masuk ke negara Indonesia dengan mudahnya dan mengendap pada pemikiran-pemikiran warga negara yang tidak begitu memahami arti penting Pancasila bagi keutuhan bangsa. Hingga pada akhirnya muncul istilah radikalisme yang merujuk pada aktivitas warga negara yang bertentangan dengan ideologi bangsa serta identik pula dengan aktivitas yang mengandung kekerasan yang dapat menghancurkan harmonisasi kehidupan berbangsa. Indrawan dan Efriza (2017, hlm.) mengartikan bahwa "radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada".

Kemudian dalam rangka melaksanakan bela negara dapat diwujudkan dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Perwujudan bela negara ini dapat dilaksanakan melalui pemahaman dasar kemiliteran untuk mampu menunjang komponen utama yakni TNI dan Polri dalam rangka membantu pertahanan dan keamanan ketika suatu waktu keadaan negara tengah genting dengan adanya ancaman militer maupun militer.

c. Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Perjuangan NU

Kemajuan zaman yang semakin masif merambah pada semua lini kehidupan masyarakat banyak memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena realitasnya selalu menuntut setiap warga negara untuk mampu mengikuti alur perkembangannya. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi perkembangan nilai-nilai hasil globalisasi yang tidak sejalan dengan nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengikis pilar-pilar kebangsaan sehingga mengakibatkan degradasi sikap nasionalisme, patriotisme, hingga tumbuhnya sifat apatis akan keutuhan bangsa.

Menurut Budiwibowo (2016, hlm.575) kesadaran bela negara perlu lebih ditingkatkan karena adanya pengaruh globalisasi di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dengan upaya sebagai berikut.

- 1) Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam.
- 2) Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar.
- 3) Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.
- 4) Mencegah dan memberantas korupsi.
- 5) Meningkatkan kualitas perilaku kehidupan beragama.

Kesadaran akan budaya bangsa serta budaya daerah merupakan hal penting untuk senantiasa ditumbuhkan dan dipupuk pada diri setiap anak bangsa, karena melalui hal ini generasi mendatang tidak akan pernah kehilangan jati diri bangsanya yang sangat sarat nilai dan makna. Kemudian melalui pembelajaran di sekolah, kesadaran bela negara akan terpupuk ketika siswa mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk senantiasa belajar dan mengembangkan potensi kemampuannya untuk menunjang hari depan yang lebih baik.

Kesadaran bela negara secara sederhana juga dilakukan melalui aktivitas sehari-hari, terutama sebagai warga negara yang baik dapat ditunjukkan melalui kepatuhan pada hukum yang berlaku. Hukum di sini dapat berarti pada hukum nasional yang ditegakkan negara maupun juga pada hukum yang dianut dirinya dalam kehidupan beragama. Melalui sikap patuh pada hukum ini secara

berkesinambungan akan bertautan pula pada hadirnya kesadaran akan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara tidak langsung juga berkaitan erat dengan upaya pembelaan negara.

Pencegahan korupsi kini juga menjadi suatu yang sangat penting dilakukan, dewasa ini dengan ditetapkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa/ *extraordinary crime* dalam kehidupan berbangsa. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya tindakan buruk tersebut dihindari dan didukung pelaksanaan pemberantasannya mengingat bahaya laten korupsi telah menjalar pada berbagai tingkat dengan kuantitas yang beragam pula.

Selain itu pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara juga dapat dilaksanakan melalui cara lain selain yang telah disebutkan di atas. Menengok pada sejarah masa lampau terdapat banyak sekali nilai-nilai kejuangan yang dapat diambil hikmahnya untuk dipetik dan diimplementasikan pada masa kini. Salah satunya adalah kajian mengenai peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sirnayatin (2017, hlm.315) menuturkan bahwa “mempelajari sejarah juga mempunyai kontribusi yang sangat besar karena dengan mempelajari sejarah dapat mengembangkan kesadaran sejarah, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam sebuah peristiwa sejarah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan pemahaman akan

pentingnya masa lalu demi masa depan". Penuturan tersebut memberikan penjelasan bahwa pembelajaran sejarah baik melalui pelaksanaan pendidikan formal, non-formal, maupun informal dapat diupayakan untuk meningkatkan kesadaran bela negara.

NU sebagai organisasi masyarakat Islam yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah basis kekuatan yang potensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi tersebut akan sangat bermanfaat apabila di arahkan menuju arah yang baik. Maka dari itu hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan yang terencana. Terdapat beberapa cara yang dapat dilaksanakan untuk melaksanakan peningkatan kesadaran bela negara melalui kajian perjuangan NU pada masa perjuangan kemerdekaan, antara lain melalui pendidikan, pemaknaan politik kebangsaan NU.

1) Pendidikan

Pendidikan selalu menjadi sarana yang sangat optimal dalam perkembangan pengetahuan, pemahaman, hingga ideologi pada sebuah bangsa. Pendidikan yang dimaksud pada hal ini dapat berupa pendidikan yang merujuk pada pengembangan kognitif, afektif, maupun psikomotor. UNESCO (dalam Dirjen Dikti, 2008) menjelaskan bahwa "untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa empat pilar pendidikan: (1) *learning to know*,

(2) *learning to do*, (3) *learning to live together*, (4) *learning to be*".

Learning to know, memiliki arti bahwa pendidikan berusaha memberikan pengetahuan bagi para peserta didik yang menjalani pelaksanaan pendidikan tersebut. Melalui hal ini dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan suatu pola pendidikan yang memberikan pemahaman secara teoritis melalui kegiatan belajar mengajar. Kaitannya dengan kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan dapat memberikan *recall* akan sikap dan kesadaran bela negara bangsa Indonesia kala itu dengan berlandaskan pemikiran nasionalisme. Sehingga peserta didik dapat memaknai bahwa perjuangan kemerdekaan NU bukan hanya sekedar untuk meninggikan suatu golongan Islam saja, namun lebih dari itu berjuang untuk kepentingan bersama tanpa menghiraukan golongan, agama, dan suku bangsa. Melalui hal ini peserta didik akan mendapatkan pengetahuan yang luas bahwa negara ini tidak berdiri untuk satu golongan saja namun juga bertindak untuk saling merangkul dalam perbedaan.

Learning to do, menyiratkan makna untuk menggugah peserta didik agar mampu bertindak secara langsung dalam upaya bela negara melalui cerminan yang disampaikan dalam kajian peran NU pada masa

perjuangan. Implementasi ini dapat berupa tindakan pluralis dan berdiri bersama dalam perbedaan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Farih (2016, hlm.279) menyampaikan bahwa “NU menganjurkan untuk senantiasa memupuk persatuan di tengah masyarakat yang plural dengan cara menanamkan sikap menghargai perbedaan lewat komunikasi dialog dalam konteks mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara”.

Learning to live together, pilar ini merupakan pilar yang berdampak besar bila dapat diimplementasikan oleh para peserta didik setelah memahami kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan. Fenomena radikalisme dan juga masalah-masalah transnasional yang sering kali muncul belakangan ini di negara Indonesia akan dapat dihindarkan apabila warga Indonesia memahami serta mampu mengimplementasikan makna bahwa Pancasila dan agama adalah hal yang memiliki hubungan erat dan tidak saling berseberangan. Aswar (2016, hlm.14) menuturkan bahwa “pendirian NU tidak berubah dan tetap menjadikan NKRI sebagai sesuatu yang final dan sudah islami”. Argumen tersebut memberikan kejelasan bahwa mempelajari perjuangan NU dari dulu hingga saat ini memberikan suatu kesejukan bagi kehidupan yang plural pada bangsa ini dengan melandasi pemikiran

bahwa NKRI adalah final dan tidak dapat diganti sekalipun dengan pemikiran untuk mendirikan negara Islam.

Learning to be, melalui pendidikan yang mengkaji peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat merangsang karakter bela negara bagi setiap warga negara dengan tindakannya yang menjalankan syariat Islam, sekaligus juga memiliki pemahaman untuk mengimplementasikan yang telah dicirikan para pejuang NU kala itu yakni *hubb al-wathan min al-iman*. Rofiq (2018, hlm.49) menuturkan bahwa “bagi seseorang yang mendapatkan pendidikan karakter cinta tanah air yang merupakan implementasi slogan *hubb al-wathan min al-iman* K.H. Hasyim Asy’ari, akan terbentuk karakter mempunyai rasa bangga terhadap bangsa dalam bahasa, budaya, sosial, politik, serta ekonomi sehingga rela berkorban untuk mempertahankan, melindungi, dan memajukan bangsa secara sadar tanpa ada paksaan dari siapa pun”. Implementasi *hubb al-wathan min al-iman* tersebut dapat mendorong warga negara untuk menjadi warga negara yang siap dalam membela negara dengan segenap kemampuannya berdasar pada keyakinan pada Tuhan serta diiringi dengan rasa cinta pada tanah airnya.

2) Makna Politik Kebangsaan NU

Memaknai politik kebangsaan NU pada masa perjuangan kemerdekaan sejatinya dapat menjadi suatu rangsangan bagi kehidupan pada masa kini untuk tidak membenturkan kajian keislaman dengan kajian kenegaraan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI. Rifai (dalam Fadhli dan Hidayat, 2018, hlm.64) mengisahkan bahwa “ketika ditanya bagaimana status hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, K.H. Hasyim Asy’ari menjawab: statusnya sah secara fikih, karena itu umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankannya”.

Ungkapan tersebut memberikan penguatan yang nyata bahwa NU pasca kemerdekaan secara langsung memberikan legitimasi akan berdirinya negara yang wajib didukung keutuhan dan kedaulatannya. Hal ini jelas memberikan gambaran bahwa politik kebangsaan NU sejak awal adalah memiliki pandangan akan keislaman yang tetap menjunjung tinggi nasionalisme kenegaraan. Adapun aksi politik kebangsaan yang dipelopori K.H. Hasyim Asy’ari pada masa perjuangan kemerdekaan dalam perjuangan kemerdekaan diterangkan oleh Hidayatullah (2017, hlm.80) bahwa “kontribusi K.H. Hasyim

Asy’ari dalam aksi politik kebangsaan berdasarkan *ahlussunnah wal jama’ah* diwujudkan melalui 1) *hubb al-watan*, 2) *ukhuwah*, 3). Laskar TNI (*Hizbullah*), dan 4) Resolusi Jihad”.

Hubb al-watan, mendasari suatu pemikiran dan tindakan yang memaknai kehidupan Islam di Indonesia tidak bertentangan nasionalisme, bahkan kecintaan akan negara merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Catatan sejarah memberikan penjelasan yang jelas bahwa melalui perwujudan *hubb al-watan* para pejuang Islam mengobarkan semangat berani mati demi negara dalam perjuangan melawan sekutu dan Belanda yang kembali datang dengan niat buruk setelah Indonesia merdeka.

Ukhuwah, memiliki persamaan arti dengan persaudaraan yang bertautan juga dengan makna persatuan pada sila ketiga Pancasila yakni “Persatuan Indonesia”. Hal ini memberikan arti bahwa politik kebangsaan NU sangat erat kaitannya dengan Pancasila dan tidak berlawanan dengan Pancasila itu sendiri. Tentu saja ini menjadi sebuah nilai yang penting untuk diinternalisasikan dalam diri setiap warga negara untuk mampu menunjang pelaksanaan bela negara yang memiliki perhatian luas pada diri sendiri, masyarakat, serta pada negara.

Hizbullah, sebagai laskar pejuang yang lahir dari rahim NU pada masa

perjuangan kemerdekaan, laskar ini dapat dijadikan teladan dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Melalui perjuangannya mampu mengisi kekosongan tentara yang saat itu masih berjumlah sedikit dan belum terorganisir seperti saat ini. Melalui semangat jihad, para pemuda yang tergabung dalam Hizbullah ini kemudian dapat mengusir sekutu dan Belanda dalam pertempuran di Surabaya. Pesan tersirat yang dapat dijadikan landasan dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara adalah mereka berani berjuang demi bangsa tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan dari negara, semata-mata karena seruan jihad di jalan Allah.

Resolusi jihad, menjadi salah satu faktor yang membangkitkan semangat para pejuang kemerdekaan untuk tidak takut untuk berlaga di medan juang demi keutuhan NKRI. Resolusi jihad yang diprakarsai K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh besar NU menyiratkan arti bahwa sang tokoh Islam ini memiliki perhatian yang sangat besar bagi perjuangan bangsa untuk melanggengkan kedaulatan NKRI. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi para tokoh bangsa saat ini, bahwa kedaulatan NKRI bukan hanya tanggung jawab tokoh-tokoh nasionalis, lebih dari itu kesadaran akan keutuhan NKRI melalui bela negara perlu ditularkan oleh semua elemen sehingga dapat terinternalisasi

secara holistik pada diri bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di negeri ini memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui perannya yang menjadi basis besar untuk menggerakkan umat Islam serta warga umum akan konsep kebangsaan dan konsep jihad di jalan Allah melawan para penjajah memberi suatu pelajaran berharga untuk dijadikan cerminan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini.

Peran warga negara yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa menjadi suatu perhatian yang tinggi untuk dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan negeri dengan segala upayanya. Bela negara menjadi salah satu tindakan yang dapat diimplementasikan dalam hal tersebut guna menjaga keutuhan NKRI. Tindakan pembelaan negara tidak selalu bertautan dengan aktivitas kemiliteran, namun juga dapat dilaksanakan melalui aktivitas lain merujuk pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesadaran bela negara meningkat urgensinya ketika globalisasi bertumbuh secara luas pada tatanan kehidupan dunia, hal ini memberikan dampak yang positif maupun negatif. Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, masuknya kebudayaan, gaya hidup, hingga ideologi

dari negara lain sedikit banyak memberikan ancaman yang dapat merusak keutuhan dan kemurnian ideologi bangsa apabila tidak disaring dengan bijaksana. Maka dari itu penting sekali untuk hadirnya sebuah upaya peningkatan kesadaran bela negara melalui kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara melalui kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dirangsang melalui dua cara yakni pendidikan dan pemaknaan akan politik kebangsaan NU. Keduanya dapat dikaji berdasarkan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan sikap NU pada saat perjuangan kemerdekaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali nilai-nilai baik yang dapat diteladani dalam konsep kesejarahan untuk dipetik manfaatnya dan diimplementasikan pada hari ini.

Perjuangan kemerdekaan yang didukung oleh perjuangan NU sebagai komponen organisasi muslim yang

sangat besar di Indonesia, dapat mengisi kekosongan dan kelemahan pada tubuh negara. Adapun perjuangan kemerdekaan yang dapat dijadikan teladan antara lain semangat cinta tanah air melalui gagasan *hubb al-watan min al-iman*, berani berkorban dengan merujuk pada resolusi jihad yang dikumandangkan untuk mengusir penjajah, serta persatuan dalam keberagaman dengan tidak meninggikan kepentingan pribadi maupun golongan, hal ini diwujudkan para pejuang NU dengan meninggikan semangat nasionalisme berdampingan dengan semangat persaudaraan dalam bingkai kaidah Islam.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman akan upaya peningkatan kesadaran bela negara melalui kajian peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan internalisasi kesadaran bela negara pada diri setiap warga negara.

5. Referensi

Buku

- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara.
- MPR RI. (2017). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sudirwo, D. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi*. Bandung: CV. Randu Alas.
- Tjakrawerdaja, dkk. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Wuryan, S. & Syaifullah. (2015). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Adnan, M. (2016). Nahdlatul Ulama dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.2, (1), 19-25.
- Arliman, L.S. Perlindungan terhadap Anak sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara. *Jurnal Hukum Republica*. Vol.17, (1), 128-150.
- Aswar, H. (2016). Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia. *Thaqafiyat*. Vol. 17, (1), 1-17.
- Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi Pancasila dan bela Negara dalam Menghadapi Tantangan Global melalui Pembelajaran Berbasis Multi kultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.2, (2), 565-585.
- Fadhli, M.R., & Hidayat, B. (2018). K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Swarnadwipa*. Vol.2, (1), 61-72.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.24, (2), 251-284.
- Hidayatullah, M.F. (2017). Hiden Movement KH. Hasyim Asy'ari dalam Kajian Fiqih Siyasah. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol.5, (2), 73-90.
- Indrawan, R.M.J. & Efriza. (2018). Membangun Komponen Cadangan berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol.8, (2), 21-40.
- Ridhuan, S. (2018). Enam Watak Manusia Indonesia dalam Perspektif Bela Negara, Konflik Sosial, dan Pembangunan Masyarakat. *Prosiding SENDI* (hlm.432-437)
- Rofiq, N. (2018). Telaah Konseptual Implementasi Slogan *Hubb Al-Wathan Min Al-Iman* K.H Hasyim Asy'ari dalam Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. Vol.16, (32), 44-52.
- Saragih, H.J.R., Putri, S.R.K., & Wardana, A.C.K. (2018). Implementation of Bela Negara Values to Develop a Good Public Service. *Asian Association for Public Administration Annual Conference* (hlm.286-295). Atlantis Press.
- Sumawijaya & Berantas, S. (2015). Upaya Bela Negara melalui Pendidikan Sejarah. *Jurnal Pertahanan*. Vol.5, (3), 43-62.

Publikasi Pemerintah

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2008). *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum berbasis Kompetensi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.